

# Inventaris **Arsip**

**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
PERIODE 1970 - 1997**

BIDANG PENGELOLAAN ARSIP DAN LAYANAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DKI JAKARTA

**2024**

**INVENTARIS ARSIP  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
PERIODE 1970-1997**



**BIDANG PENGELOLAAN ARSIP DAN LAYANAN  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

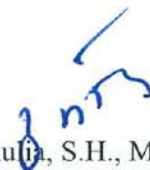
Dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa Lembaga Arsip Daerah Provinsi wajib mengelola arsip statis dari perangkat daerah, perusahaan, organisasi masyarakat maupun politik yang terdapat pada Provinsi tersebut. Dalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Lembaga Kearsipan Daerah bertanggung jawab dalam mengelola perpustakaan dan kearsipan. Pengelolaan arsip statis berada di bawah naungan Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan DISPUSIP. Kegiatan itu dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban daerah Provinsi DKI Jakarta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengelolaan arsip statis yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta merupakan memori kolektif, identitas bangsa, bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta sumber informasi publik. Oleh karena itu, demi meningkatkan mutu pengolahan arsip statis maka khazanah arsip statis yang tersimpan di DISPUSIP Provinsi DKI Jakarta harus diolah dengan benar berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan. Inventaris Arsip ini merupakan sarana bantu penemuan kembali arsip statis Kota Administrasi Jakarta Pusat yang tersimpan di DISPUSIP.

Kami menyadari bahwa inventaris arsip ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami dengan senantiasa mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan penyusunan inventaris arsip ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan inventaris arsip ini hingga selesai.

Jakarta, 14 Agustus 2024

Kepala Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan,



Fitri Aulia, S.H., M.AP.

NIP 197003201997032003

## **TIM KERJA/PENYUSUN**

<b>Penanggung Jawab</b>	: Fitri Aulia Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan
<b>Koordinator Kegiatan</b>	: Ari Imansyah
<b>Sekretaris</b>	: Riska Damastika Ayuningtyas
<b>Tim Pelaksana</b>	: Khumedi Winoto Ade Mardiansyah Nurdi Irawanto Noviani Nur Amalika Cahya Rizky Irvandi

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TIM KERJA/PENYUSUN.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Sejarah Organisasi.....	1
2. Sejarah Arsip.....	1
3. Pertanggungjawaban Penyusunan Inventaris Arsip.....	1
3.1. Pengolahan Arsip.....	1
3.2. Petunjuk Akses Arsip.....	1
<b>II. URAIAN DESKRIPSI.....</b>	<b>2</b>
A. Instruksi.....	2
B. Keputusan.....	2
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>3</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>5</b>

## I. PENDAHULUAN

### 1. Sejarah Organisasi

Jakarta memperoleh namanya pertama kali pada September 1945 dengan nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta. Pada saat itu Jakarta sudah menjadi pusat politik dan pemerintahan Indonesia. Tahun 1959, Jakarta mulai dipimpin oleh Gubernur karena perubahan statusnya menjadi Daerah Tingkat Satu (Provinsi). Lalu, dua tahun setelahnya Jakarta memperoleh status baru menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). Kemudian, pada 31 Agustus 1999 Jakarta menjadi pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang (UU) RI Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dengan status otonomi yang memiliki kota administrasi ("Sejarah Jakarta" dalam situs resmi Provinsi DKI Jakarta). Pada 2007, Undang-Undang itu dicabut dengan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan.

Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan salah satu dari Kota Administrasi yang dimiliki Jakarta. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 menyatakan bahwa sebuah kota administrasi dipimpin oleh walikota yang diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari PNS yang memenuhi syarat. Walikota bertugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur ("Sejarah Kota Administrasi Jakarta Pusat" dalam situs resmi Jakarta Pusat). Walikota kemudian bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### 2. Sejarah Arsip

Arsip statis Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri dari tujuh kategori, yaitu Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Surat Biasa, Kawat, Akta, Berita Acara, Laporan, dan Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Arsip-arsip itu

diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) Provinsi DKI Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024 sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Arsip Statis Nomor: 223/KA.03.00. Verifikator yang bertugas menilai dari DISPUSIP adalah Agus Suherman, Siti Zulaika Zein, dan Muhammad Imam Wibowo. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa 40 (empat puluh) arsip yang diajukan oleh DPPAPP sesuai dengan kriteria arsip statis sehingga disetujui oleh Kepala DISPUSIP untuk menjadi khazanah arsip statis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu tertera di dalam Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0022 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Arsip Statis Sebanyak 115 (Seratus Lima Belas) Arsip Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Arsip Statis DPPAPP yang diserahkan ke DISPUSIP berjumlah 40 (empat puluh) arsip dalam kurun waktu 1970-1997. Media arsip yang diserahkan seluruhnya berupa arsip kertas dalam bentuk beberapa asli dan beberapa salinan. Isi informasi arsip terkait dengan 18 (delapan belas) Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 17 (tujuh belas) Surat Biasa, 1 (satu) Kawat, 1 (satu) Akta, 1 (satu) Berita Acara, 1 (satu) Laporan, dan 1 (satu) Instruktur Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### **3. Pertanggungjawaban Penyusunan Inventaris Arsip**

#### **3.1. Pengolahan Arsip**

Pengolahan arsip statis Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 1970-1997 dilakukan oleh Sub Kelompok Pengelolaan Arsip Statis DISPUSIP yang terdiri dari Ketua Sub Kelompok, Arsiparis, serta Staf Administrasi. Pengolahan dan penyusunan Inventaris Arsip Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 1970-1997 dilaksanakan selama 2 (bulan), mulai dari April hingga Mei 2024. Prosedur pengolahan arsip mengacu kepada Peraturan Kepala ANRI Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis.

#### **3.2. Petunjuk Akses Arsip**

##### **3.2.1. Penggunaan Inventaris Arsip**

Inventaris ini terdiri dari pendahuluan, uraian deskripsi, penutup, daftar pustaka, lampiran yang memuat indeks tempat, indeks nama orang, indeks perusahaan/organisasi, dan daftar singkatan. Inventaris ini memuat 40 (empat puluh) nomor arsip dan tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.

Untuk efektivitas penelusuran arsip yang terdapat dalam Inventaris Arsip Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 1970-1997, sebaiknya pengguna perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) Provinsi DKI Jakarta dengan mengisi formulir dengan kelengkapan syarat, yaitu KTP, surat permohonan (untuk permohonan instansi dilengkapi dengan surat berkop instansi dan tanda tangan dari pimpinan/pejabat yang terkait), serta informasi kontak yang bisa dihubungi.
2. Petugas Layanan dari DISPUSIP Provinsi DKI Jakarta akan mencatat atau meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik.
3. Jika semua berkas permohonan yang diajukan sudah lengkap, maka dari layanan DISPUSIP Provinsi DKI Jakarta akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik. Pemberitahuan tertulis ini merupakan jawaban atas permohonan informasi yang akan diberikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
4. Jika berkas yang diajukan tidak lengkap maka Layanan DISPUSIP Provinsi DKI Jakarta meminta kelengkapan data kepada pemohon dengan mengirim surat permohonan kelengkapan data, kelengkapan data ini diterima paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
5. Jika informasi yang diminta belum disimpan/diarsipkan, maka DISPUSIP DKI Jakarta dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang.

### 3.2.2. Penggunaan Arsip sebagai Sumber Data

Arsip sebagai rekaman kegiatan dan peristiwa merupakan sumber data primer untuk penelitian ilmiah. Penulisan kutipan penggunaan arsip Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengembangan Penduduk (DPPAPP) Periode 1992-1996 yang terdapat dalam inventaris ini sebagai sumber data penelitian/penulisan karya ilmiah dilakukan sebagai berikut:

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, *Inventaris Arsip Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 1970-1997*, Jakarta, 2024, Nomor Inventaris ...

Atau:

DISPUSIP, *Inventaris Arsip Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 1970-1997*, Jakarta, 2024, No. Inventaris ...

## II. URAIAN DESKRIPSI

### A. Keputusan

1. Keputusan Wali Kota Djakarta Pusat Nomor 2569/30/DP/1970 Tentang Pembentukan Susunan Badan Konsultasi Masalah Betjak dalam Wilayah Djakarta Pusat.

10 Maret 1970

Asli

2 lembar

2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta Nomor ca.3/1/25/70 tentang Pembentukan Team Penilai (Sensor) Pertundjukan Hiburan2 Daerah Khusus IbuKota Djakarta.

23 Mei 1970

Salinan

2 lembar

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta Nomor Ca.3/1/30/70 tentang Penetapan Sekretariat dan Tata Kerdja team penilai pertundjukan/ hiburan2 Daerah Khusus Ibukota Djakarta.

15 Juni 1970

Salinan

2 lembar

4. Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor WS.IV.09/SK/a/III/73 Tentang Pembentukan Team Pemindahan Penduduk/ Pengusaha Sapi Perah Yang Terkena Proyek Otorita Kuningan.

6 Maret 1973

Salinan

2 lembar

5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 508/7/1973 Tentang Izin Penggunaan Rumah Dinas/ Rumah Jaga di Kompleks Sekolah Dasar Jalan Kesatrian V untuk a.n. Atmadja - Jabatan: Penjaga SD Pendawa.

10 Maret 1973

Asli

2 lembar

6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 342/7-1973 Tentang Ijin Penggunaan Rumah Dinas/Rumah Jaga di Kompleks Sekolah Dasar Pondok Bambu.

4 April 1973

Salinan

2 lembar

7. Keputusan Wali Kota Jakarta Pusat Nomor 2779/14/Pemb/JP/73 Tentang Pembentukan Panitia Tehnis Pembangunan Rumah Bersalin Kecamatan Kemayoran Dan Kecamatan Tanah Abang Wilayah Jakarta Pusat Atas Bantuan World Bank/ IDA.

21 Desember 1973

Salinan

2 lembar

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 759 Tahun 1982 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, Ir. Heri Prasajo NIP.470007898 NRK.37322 Pegawai Negeri Sipil Daerah Pem. DKI Jakarta dalam Pangkat Penata-TK.I (III/d) Dari Jabatan Staf Ahli Gubernur menjadi PJ. Wakil Walikota Jakarta Timur.

23 Agustus 1982

Salinan

2 lembar

9. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta Nomor 385 B/PPK DKI/VI/83 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Peneliti dan Penilai Kegiatan Kesehatan dan Hiburan Dalam Rangka Hubungan Luar Negeri (KPP) DKI Jakarta.

10 Juni 1983

Salinan

2 lembar

10. Keputusan Wali Kota Jakarta Pusat Nomor 97.thn.1984 Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah Khusus IbuKota Jakarta di wilayah Jakarta Pusat.

1 Oktober 1984

Salinan

2 lembar

11. Keputusan Walikota Jakarta Pusat Nomor 041/ Tahun 1988 Tentang Petugas Pelayanan Masyarakat (Surat Kenal Lahir/ Surat Kenal Mati Dan Surat Keterangan Izin Ganti Nama).

18 Juni 1988

Salinan

2 lembar

12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 1266 Tahun 1993 tentang Tunjangan Jabatan lokasi bagi para pejabat struktural non eselon di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2 September 1993

Salinan

2 lembar

13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62 Tahun 1994 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan

Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Tingkat Kotamadya Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta.

17 Januari 1994

Asli

2 lembar

14. Keputusan Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 49 Tahun 1994 Tentang  
Penunjukan Pelaksana Tugas Sehari-hari Camat Kemayoran Wilayah Jakarta  
Pusat a.n. Drs. H. Suparlan (NIP 470036359 NRK 49662).

19 April 1994

Asli

2 lembaran

15. Keputusan Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 52 Tahun 1994 tentang  
Penunjukan Pelaksana Tugas Sehari-hari Camat Tanah Abang Wilayah  
Kotamadya Jakarta Pusat a.n. Drs. Chairusnas Yusuf, MBA. NIP/ NRK :  
470009701/ 42922.

3 Mei 1994

Salinan

2 lembar

16. Keputusan Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 134 Tahun 1994 Tentang  
Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi  
Kepentingan Umum Kotamadya Jakarta Pusat.

23 Mei 1994

Asli

2 lembar

17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 714 Tahun  
1994 Program Pendidikan dan Pelatihan dasar HANKAMNAS, Resimen  
Mahasiswa, Dakhura, Suskalak B, Suskalak A Pertahanan Sipil Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Disiplin Nasional dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Bagi Masyarakat.

3 Juni 1994

Asli

2 lembar

18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1634 Tahun 1994 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Fly Over Jalan Karet Dengan Pelebaran Jalan K H Mas Mansyur Sampai dengan Jalan Karet Sesuai Batas Perencanaan yang terletak di Kelurahan Kebon Melati dan Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta Pusat.

1 Desember 1994

Salinan

2 lembar

## **B. Surat Biasa**

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada PT Karya Utama Thamrin Plaza Nomor 3802/VI/1982 perihal Bangunan Kantor Thamrin Plaza - terkait mengingatkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT Karya Utama Thamrin Plaza.

1 Juni 1982

Salinan

2 lembar

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Nomor 03999/VI/82 perihal SK Gubernur No. 289/1982 Tentang Penyempurnaan Pola Operasional Pembangunan Lima Tahun Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1979/1980 - 1980/1984.

7 Juni 1982

Salinan

2 lembar

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Menteri Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup nomor 04000/VI/82 perihal Rencana Pengembangan JABOTABEK.

7 Juni 1982

Salinan

2 lembar

4. Surat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Direksi Hotel Sari Pasific Jl. Thamrin Nomor 04021/VI/1982 perihal Pemberitahuan Tanah Kavling di sebelah Utara Gedung Hotel Sari Pasific akan mulai dilakukan pembongkaran bangunan lama dan pemagaran halaman, perusahaan yang ditunjuk adalah PT Karya Utama Plaza.

8 Juni 1982

Salinan

2 lembar

5. Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Kopertis Wilayah III Nomor 0301/BKD-Wk.III/82 hal bantuan pembangunan gedung kantor Kopertis wilayah III (*common use*).

23 Juni 1982

Salinan

2 lembar

6. Surat Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup kepada Menteri Koordinator Bidang EKUIN Nomor B-1291/MNPPLH/6/1982 hal Jakarta Sewerage And Sanitation Project (JSSP).

25 Juni 1982

Salinan (tembusan)

2 lembar

7. Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DKI Jakarta Nomor 04480/VI/1982 perihal Penyelesaian Kasus-Kasus Yang Terjadi di Pasar Inpres Blok VI Senen Jakarta Pusat.

30 Juni 1982

Salinan

2 lembar

8. Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada PT Karya Utama Plaza Nomor 04481/VI/1982 perihal Pembangunan Gedung Kantor Thamrin Plaza - Persetujuan untuk memasuki lokasi pembangunan.

30 Juni 1982

Salinan

2 lembar

9. Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 05648/VIII/1982 perihal SK Gubernur No.289/1982 Tentang Penyempurnaan Pola Operasional Pembangunan Lima Tahun Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1979/1980 - 1983/1984.

23 Agustus 1982

Asli

2 lembar

10. Surat Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I DKI Jakarta Nomor B-2763/As.I/KLH/12/85 perihal Pengerukan Pasir Laut - hasil peninjauan lokasi pengerukan pasir laut di teluk jakarta di bawah koordinasi BKLH-DKI beserta PT Tropical Jaya.

30 Desember 1985

Salinan

2 lembar

11. Surat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Alamsyah Hanafiah, S.H. Kuasa Sdr. Suwarko Nomor 111/073.3 perihal Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Oleh PT. Kuningan Persada - terkait permohonan ganti rugi tanah.

14 Januari 1994

Asli

2 lembar

12. Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Dirjen PUOD nomor 150/077.72 perihal Laporan Rapat Panjatapda Tanggal 17 November 1993.

18 Januari 1994

Asli

2 lembar

13. Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus IbuKota Jakarta kepada Direktur PT Bumi Perkasa Propertindo Harmoni Plaza nomor 358/-1.711 perihal persetujuan prinsip kerjasama pembangunan dan pengelolaan bidang tanah kav. 6 di M.H. Thamrin Kec. Menteng, Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat.

3 Februari 1994

Salinan

2 lembar

14. Surat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia nomor 5221/-1.711.9 hal Sengketa Tanah Antara Ahli Waris Imam Syafi'ie Dan Pemerintah DKI JAKARTA c.q. PD Wisata Niaga Jaya - Penjelasan Kronologis.

16 Februari 1994

Asli

2 lembar

15. Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Ketua DPRD DKI Jakarta nomor 1284/-1.777.6 perihal Persetujuan Subsidiary Loan Agreement - terkait pelaksanaan proyek perbaikan sistem persampahan di DKI Jakarta yang dibiayai oleh Dana Bantuan Luar Negeri OECF.

26 April 1994

Salinan

2 lembar

16. Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada PT Super Progress Nomor 1285/-1.711.7 hal Penyerahan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Atas Bidang Tanah Seluas 141.984 m<sup>2</sup> Sesuai Perjanjian Kerja Sama No. 1568 Tahun 1992 Tanggal 5 Oktober 1992 Antara Pemerintah DKI JAKARTA Dengan PT. Super.

26 April 1994

Asli

2 lembar

17. Surat Kantor Sosial Politik Pemerintah Kotamadya Jakarta Pusat kepada Para Camat se-Jakarta Pusat Nomor 267/1.857 perihal Larangan Kegiatan Ajaran Darul Argam.

6 Oktober 1994

Salinan

2 lembar

### **C. Kawat**

1. Kawat Panitia Repatriasi Suku Maluku kepada Gubernur KDH DKI Jakarta nomor 24/PANMAL/VI/1982 Penyelenggaran Dana Proyek Pembangunan Lingkungan.

25 Juni 1982

Salinan

2 lembar

#### **D. Akta**

1. Akte Notaris Ny. Gretha Liestijawatie S.H. - Perjanjian Sewa menyewa antara nyonya Hajjah Nurul Kartinah Wardani dengan Tuan Rudy Effendi - qq CV Hidup Baru.

23 Juli 1985

Salinan

2 lembar

#### **E. Berita Acara**

1. Berita Acara Pemeriksaan Kas Inspektorat Wilayah Propinsi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai surat tugas nomor st.034.2-00/3/93 tanggal 30 Maret 1993.

31 Maret 1993

Salinan

2 lembar

#### **F. Laporan**

1. Laporan Kegiatan Tahun Kerja 1994 Rukun Tetangga 008/RW 07 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kotamadya Jakarta Pusat.

20 Juli 1994

Asli

2 lembar

#### **G. Instruksi**

1. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 169 Tahun 1997 perihal Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Kanwil BPN DKI JAKARTA.

14 Mei 1997

Asli

2 lembar

## DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. *Sejarah Kota Administrasi Jakarta Pusat*. Diakses melalui <https://pusat.jakarta.go.id/tentang/sejarah-kota> pada 14 Agustus 2024.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Sejarah Jakarta*. Diakses melalui <https://www.jakarta.go.id/sejarah-jakarta> pada 14 Agustus 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**Indeks Tempat**

**D**

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

**K**

Kota Administrasi Jakarta Pusat

**Indeks Nama Orang**

**A**

Agus Suherman

**M**

Muhammad Imam Wibowo

**S**

Siti Zulaika Zein

**Indeks Perusahaan/Organisasi**

**D**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

**J**

Jakarta Sewerage And Sanitation Project

**O**

Overseas Economic Cooperation Fund

**P**

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

**Daftar Singkatan**

DISPUSIP	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
JSASP	: Jakarta Sewerage And Sanitation Project
OECD	: Overseas Economic Cooperation Fund
UU RI	: Undang-Undang Republik Indonesia

Selain itu, Inventaris Arsip ini juga menjadi bukti pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Arsip dan Layanan DISPUSIP DKI Jakarta, khususnya Sub Kelompok Pengelolaan Arsip Statis, yang disusun melalui proses kerja arsip statis yang memegang teguh asas atau prinsip pengolahan arsip statis dan tahapan kerja yang tepat.

Harapan penyusun adalah semoga Inventaris Arsip ini dapat membantu pengguna arsip dalam mencari arsip statis terkait Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Surat Biasa, Kawat, Akta, Berita Acara, Laporan, maupun Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang sebelumnya tersimpan di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Apabila terdapat kekurangan dalam Inventaris Arsip ini, mohon diberikan masukan agar kami dapat menyempurnakannya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 Agustus 2024

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi DKI Jakarta



Drs. Firmansyah, M.Pd.  
NIP 196410211984031001

Kepala Bidang Pengelolaan Arsip dan  
Layanan



Fitri Aulha, S.H., M.AP.  
NIP 197003201997032003